

**ANALISIS PENGARUH PERTUMBUHAN EKONOMI,
KETIMPANGAN PENDAPATAN, DAN
PENGANGGURAN TERHADAP KEMISKINAN
(Studi Pada 38 Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur Tahun
2009-2015)**

JURNAL ILMIAH

Disusun oleh :

**Dhia Nadhifah
145020101111073**



**JURUSAN ILMU EKONOMI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS BRAWIJAYA
MALANG
2018**

LEMBAR PENGESAHAN PENULISAN ARTIKEL JURNAL

Artikel Jurnal dengan judul :

**ANALISIS PENGARUH PERTUMBUHAN EKONOMI,
KETIMPANGAN PENDAPATAN, DAN PENGANGGURAN
TERHADAP KEMISKINAN
(Studi Pada 38 Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur Tahun 2009-2015)**

Yang disusun oleh :

Nama : Dhia Nadhifah
NIM : 145020101111073
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis
Jurusan : S1 Ilmu Ekonomi

Bahwa artikel Jurnal tersebut dibuat sebagai *persyaratan ujian skripsi* yang dipertahankan di
depan Dewan Penguji pada tanggal 17 Desember 2018

Malang, 17 Desember 2018

Dosen Pembimbing,



Dr. Rachmad Kresna Sakti, SE., M.Si.

NIP 196311161990021001

**ANALISIS PENGARUH PERTUMBUHAN EKONOMI, KETIMPANGAN
PENDAPATAN, DAN PENGANGGURAN TERHADAP KEMISKINAN
(Studi Pada 38 Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur Tahun 2009-2015)**

Dhia Nadhifah*, Rachmad Kresna Sakti**
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya
*Email: dhianadhifah929@gmail.com
**Email: kresna@ub.ac.id

ABSTRACT

The purpose of this study was to determine the effect of variables economic growth, income inequality, unemployment, agricultural sector, and industrial sector on poverty in 38 regencies and cities in East Java. This research is a type of quantitative research, and the data used was secondary data. The analysis technique used was regression of study panels in 38 regencies and cities in East Java with 2009-2015 observation periods. The independent variables used economic growth, income inequality, unemployment, agricultural sector, and industrial sector, with dependent variable being poverty. The result of this study show that economic growth has a positive and significant effect on poverty, income inequality has a positive and significant effect on poverty, unemployment has a positive and significant effect on poverty, agricultural sector has a positive and significant effect on poverty, and industrial sector has a not significant effect on poverty.

Keywords: poverty, economic growth, income inequality, unemployment, agricultural, industrial

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh variabel pertumbuhan ekonomi, ketimpangan pendapatan, pengangguran sektor pertanian, dan sektor industri terhadap kemiskinan pada 38 Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur. Penelitian ini merupakan jenis penelitian kuantitatif, dan data yang digunakan adalah data sekunder. Teknik analisis yang digunakan adalah regresi panel studi pada 38 Kabupaten/Kota Jawa Timur dengan periode pengamatan 2009-2015. Variabel independen yang digunakan adalah pertumbuhan ekonomi, ketimpangan pendapatan, pengangguran, sektor pertanian, dan sektor industri, dengan variabel dependennya adalah kemiskinan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kemiskinan, ketimpangan pendapatan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kemiskinan, pengangguran berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kemiskinan, sektor pertanian berpengaruh positif dan signifikan terhadap kemiskinan, dan sektor industri berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap kemiskinan.

Kata kunci: kemiskinan, pertumbuhan ekonomi, ketimpangan pendapatan, pengangguran, sektor pertanian, sektor industri

A. PENDAHULUAN

Pembangunan merupakan sebuah proses peningkatan kualitas kehidupan dan kemampuan masyarakat dengan cara meningkatkan standar hidup, harga diri, dan kebebasan seluruh kelompok masyarakat (Todaro & Smith, 2011). Yang mana tujuan dari program pembangunan adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Indonesiasecara menyeluruh sesuai dengan alenia keempat Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945. Pelaksanaan pembangunan terjadi di berbagai bidang, salah satunya adalah bidang ekonomi. Pembangunan ekonomi dapat diartikan sebagai berbagai kegiatan yang dilakukan oleh suatu wilayah untuk mengembangkan kegiatan ekonomi, yang mengakibatkan adanya peningkatan pendapatan per kapita masyarakat dalam jangka panjang, sehingga dapat meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat (Arsyad, 1988). Akan tetapi, arah dari pembangunan ekonomi tidak hanya berfokus pada pertumbuhan

semata, melainkan juga pengentasan kemiskinan, penanggulangan ketimpangan distribusi pendapatan, serta penyediaan lapangan pekerjaan.

Kemiskinan merupakan salah satu faktor penghambat dalam proses pembangunan ekonomi. Indonesia sebagai salah satu negara berkembang dan termasuk dalam kategori negara berpendapatan menengah kebawah (*lower middle income*) tak luput dari masalah kemiskinan. Program pembangunan ekonomi yang telah dicanangkan oleh pemerintah telah menaruh perhatian yang cukup besar terhadap pengentasan kemiskinan di Indonesia. Sebab, tujuan dari program pembangunan ekonomi adalah untuk meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh. Kemiskinan diartikan sebagai keadaan dimana individu (keluarga) tidak mampu mencukupi kebutuhan minimal dari standar hidup tertentu, baik berupa sandang, pangan, papan, pendidikan, dan kesehatan. Seringkali kemiskinan disebabkan oleh kondisi masyarakat yang tidak atau belum ikut serta dalam proses pembangunan. Hal ini dikarenakan kurangnya kemampuan dalam kepemilikan faktor produksi masih kurang memadai. Selain itu, disebabkan pula oleh kebijakan pemerintah yang terkait dengan masalah pembangunan masih kurang dan/atau belum sesuai dengan kemampuan dari masyarakatnya, sehingga sebagian besar masyarakat tidak memperoleh atau merasakan manfaat dari proses pembangunan yang dihasilkan tersebut.

Awal Pemerintahan Orde Baru, para pembuat kebijakan dan perencana pembangunan ekonomi meyakini bahwa proses pembangunan ekonomi di Indonesia hanya terpusat di Jawa, dan hanya terjadi pada sektor-sektor tertentu saja, yaitu sektor yang memiliki nilai tambah (*value added*) yang tinggi, dan pada akhirnya akan menghasikan apa yang disebut dengan *trickle-down effect* (efek menetes kebawah). Artinya hasil dari pembangunan ekonomi melalui pencapaian pertumbuhan ekonomi yang tinggi dirasa akan menciptakan *trickle-down effect* dan nantinya dapat membuat masyarakat menjadi lebih sejahtera (Tambunan, 2009). Teori ini pertama kali dicetuskan oleh Albert O. Hirschman pada tahun 1958. Yang menjelaskan bahwa dampak dari kemajuan suatu perekonomian akan menetes kebawah, dan akan menciptakan berbagai peluang ekonomi dan kesempatan kerja, sehingga seluruh lapisan masyarakat dapat merasakan manfaat dari adanya pertumbuhan ekonomi tersebut. Akan tetapi, belakangan ini mekanisme trickle-down effect dirasa kurang memiliki dampak terkait dengan pengentasan kemiskinan. Hal ini dikarenakan manfaat dari pertumbuhan ekonomi tidak secara langsung tertuju pada masyarakat golongan miskin, melainkan melalui masyarakat golongan kaya terlebih dulu.

Jawa Timur merupakan sebuah provinsi yang terletak di bagian timur Pulau Jawa dan Kota Surabaya sebagai ibu kotanya. Luas wilayah di provinsi Jawa Timur mencapai 47.800 km². Jumlah penduduk di Jawa Timur merupakan tertinggi kedua setelah Jawa Barat, mencapai 42.030.633 jiwa, dengan kepadatan sebesar 844 jiwa/km². Pemilihan Provinsi Jawa Timur sebagai studi kasus dalam penelitian ini dikarenakan pada tahun 2015, PDRB Jawa Timur merupakan tertinggi kedua se-Indonesia, setelah DKI Jakarta. Bahkan kontribusi PDRB Jawa Timur terhadap PDB nasional mencapai 14,85 persen di tahun 2015. Laju pertumbuhan ekonomi Jawa Timur menunjukkan tren yang fluktuatif dan cenderung menurun. Akan tetapi, rata-rata pertumbuhan ekonomi Jawa Timur masih berada di angka 6 persen. Ketika dibandingkan dengan laju pertumbuhan ekonomi nasional, angkanya selalu lebih tinggi dibandingkan laju pertumbuhan ekonomi nasional.

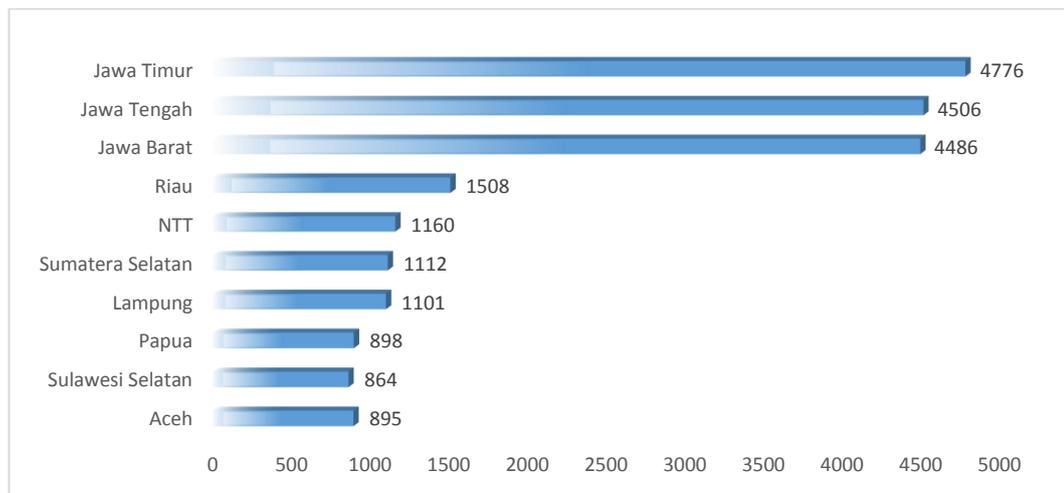
Gambar 1: Laju Pertumbuhan Ekonomi Jawa Timur dan Indonesia Tahun 2009-2015



Sumber: BPS Jawa Timur diolah, 2018.

Laju pertumbuhan ekonomi yang tinggi merupakan salah satu indikator bagi keberhasilan pembangunan ekonomi. Pandangan Tradisional meyakini bahwa apabila pendapatan per kapita masyarakat ditingkatkan, maka masalah-masalah seperti kemiskinan, ketimpangan pendapatan, dan pengangguran akan dengan mudah tercahkan melalui strategi *trickle-down effect* (Kuncoro, 1997). Akan tetapi pada realitanya, capaian pertumbuhan ekonomi yang tinggi di Jawa Timur tidak sebanding dengan kondisi kemiskinan pada provinsi tersebut. Hingga saat ini, Jawa Timur masih menjadi sarang bagi penduduk miskin. Pada tahun 2015, jumlah penduduk miskin di Jawa Timur merupakan terbanyak se-Jawa bahkan se-Indonesia, yang jumlahnya mencapai 4,78 juta jiwa. Terebih lagi pencapaian tingkat kemiskinan Provinsi Jawa Timur pada tahun 2015 yang 12,34 persen, masih berada di bawah target kemiskinan yang ditetapkan oleh pemerintah daerah dalam RPJMD yaitu sebesar 11 persen.

Gambar 2: Provinsi dengan Angka Kemiskinan Tertinggi di Indonesia Pada Tahun 2015

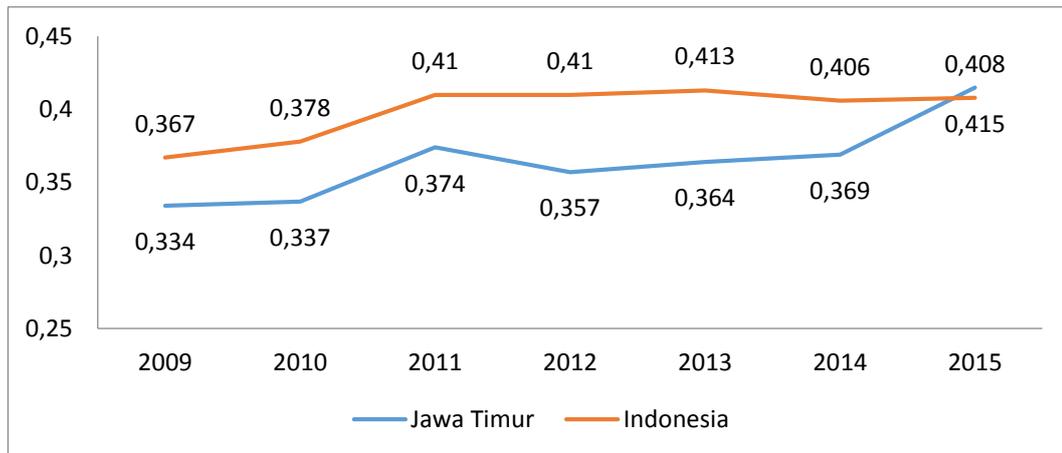


Sumber: BPS Jawa Timur diolah, 2018.

Mengacu pada kritik terhadap *trickle-down effect*, Kakwani dan Pernia mengungkapkan bahwa proses *trickle-down effect* justru akan memunculkan disparitas atau kesenjangan pendapatan antar kelompok masyarakat, yang selanjutnya akan berdampak pada bertambahnya jumlah penduduk miskin (Attibrizi, 2016). Pandangan Ekonomi Baru tentang pembangunan juga menyebutkan bahwa pertumbuhan saja tidak dapat dijadikan acuan untuk menilai berhasil atau tidaknya proses pembangunan ekonomi di suatu wilayah. Perlu adanya indikator lain seperti pemerataan distribusi pendapatan dan penurunan angka pengangguran (Todaro & Smith, 2011). Hal ini sejalan dengan pendapat Sukirno (2006) yang menyatakan bahwa modernisasi bukan merupakan tujuan utama dalam proses pembangunan ekonomi, tetapi yang terpenting yaitu bagaimana menciptakan distribusi pendapatan masyarakat menjadi lebih merata.

Ketimpangan pendapatan merupakan suatu kondisi dimana tidak meratanya distribusi pendapatan antar golongan masyarakat di suatu wilayah. Dalam mengukur tinggi rendahnya ketimpangan pendapatan biasanya dengan menggunakan indeks gini. Indeks gini merupakan suatu koefisien yang berkisar antara angka 0 sampai angka 1. Dimana koefisien tersebut menjelaskan seberapa besar tingkat pemerataan dan/atau ketimpangan distribusi pendapatan di suatu wilayah. Semakin kecil koefisiennya (mendekati angka nol) maka semakin merata, sedangkan semakin besar koefisiennya (mendekati angka satu) maka semakin timpang. Dengan kata lain, angka 0 (nol) menunjukkan bahwa distribusi pendapatan sudah sangat merata (kemerataan sempurna), sedangkan angka satu menunjukkan bahwa distribusi pendapatan sangat tidak merata (ketimpangan sempurna). Posisi indeks gini Jawa Timur pada tahun 2009-2014 berada di bawah indeks gini nasional, kemudian di tahun 2015 indeks gini Jawa Timur mengalami peningkatan yang cukup signifikan, sebesar 0,046. Bahkan peningkatan yang cukup tinggi tersebut membuat posisi indeks gini Jawa Timur berada di atas indeks gini nasional. Meningkatnya indeks gini mengindikasikan bahwa adanya perbedaan tingkat kesejahteraan antara kelompok masyarakat kaya dan kelompok masyarakat miskin di suatu daerah. Sebab, meningkatnya indeks gini akan semakin menyulitkan akses bagi penduduk miskin.

Gambar 3: Indeks Dini Provinsi Jawa Timur Tahun 2009-2015



Sumber: BPS Jawa Timur diolah, 2018

Pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi di Provinsi Jawa Timur, dinilai mampu memberikan dampak terhadap penurunan tingkat pengangguran dan pengentasan kemiskinan. Akan tetapi, masih belum dapat diapresiasi sebab ketimpangan pendapatan antar kelompok masyarakat masih mengalami peningkatan. Mengacu pada konsep *pro poor growth* yang dirumuskan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Timur yang tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Timur, yang menyebutkan bahwa laju pertumbuhan yang terjadi tidak hanya berpengaruh pada penurunan tingkat kemiskinan saja, melainkan juga mampu mempersempit kesenjangan pendapatan antar kelompok masyarakat (Grimm, *et. al.* dalam Suhartini, 2011). Menurunnya ketimpangan pendapatan akan menurunkan akan berdampak pada penurunan jumlah penduduk miskin, sehingga hasil dari pertumbuhan ekonomi tidak hanya dirasakan oleh penduduk kaya saja, melainkan oleh seluruh lapisan masyarakat, termasuk penduduk miskin.

Hajji (2010) dalam penelitiannya yang menganalisis Keterkaitan Antara Pertumbuhan Ekonomi, Ketimpangan Pendapatan, dan Pengentasan Kemiskinan di Provinsi Riau Tahun 2002-2008 menyatakan bahwa pertumbuhan ekonomi berhasil mengentaskan kemiskinan di Riau, tetapi peningkatan ketimpangan pendapatan menjadi penghambat atau mengurangi pengaruh pertumbuhan ekonomi terhadap pengentasan kemiskinan. Sektor-sektor yang berpengaruh dalam pengentasan kemiskinan adalah sektor bangunan; sektor perdagangan, hotel, dan restoran; sektor angkutan dan komunikasi; dan sektor keuangan, persewaan, dan jasa perusahaan. Sedangkan sektor pertanian; sektor industri pengolahan; sektor listrik, gas, dan air bersih justru meningkatkan kemiskinan. Attibrizi (2016) dalam penelitiannya yang menganalisis tentang Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi terhadap Kemiskinan dan Hubungannya dengan Keberpihakan Terhadap Masyarakat Miskin menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi berpengaruh negatif signifikan terhadap kemiskinan; pertumbuhan ekonomi berpengaruh tidak signifikan terhadap kemiskinan melalui perantara ketimpangan pendapatan; pertumbuhan ekonomi berpengaruh negatif signifikan terhadap kemiskinan melalui perantara Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dan pengangguran.

B. TINJAUAN PUSTAKA

A. Pembangunan Ekonomi

Pandangan Tradisional menganggap bahwa pembangunan ekonomi identik dengan upaya meningkatkan pendapatan per kapita, atau sering disebut dengan strategi pertumbuhan ekonomi. Dengan ditingkatkannya pendapatan per kapita diharapkan mampu mengatasi masalah-masalah ekonomi seperti kemiskinan, pengangguran, dan ketimpangan distribusi pendapatan. Paradigma Baru dalam Pembangunan menganggap bahwa pertumbuhan (*growth*) tidak identik dengan pembangunan (*development*). Berbeda dengan Pandangan Tradisional, pandangan ini menyatakan bahwa pencapaian pertumbuhan ekonomi yang tinggi akan dibarengi dengan masalah-masalah seperti pengangguran, kemiskinan di perdesaan, dan distribusi pendapatan yang timpang, serta ketidakseimbangan struktural (Sjahrir dalam Kuncoro, 1997). Hal ini sejalan dengan pendapat

Seers (dalam Kuncoro, 1997) yang menunjuk tiga sasaran utama dalam proses pembangunan yaitu berorientasi pada kesempatan kerja, pemerataan pendapatan, dan pengentasan kemiskinan. Dalam bukunya, Kuncoro (1997) menyebutkan bahwa proses pembangunan menghendaki adanya pertumbuhan ekonomi yang dibarengi dengan perubahan (*growth plus change*) yaitu perubahan struktur ekonomi dari sektor pertanian ke sektor industri ataupun sektor jasa, dan perubahan kelembagaan melalui regulasi maupun reformasi kelembagaan.

B. Kemiskinan

Kemiskinan merupakan masalah yang multidimensi sehingga definisi dan pengukurannya tidak mudah dituntaskan dengan menggunakan satu pengertian saja. Apabila kemiskinan di pandang sebagai masalah ekonomi, maka dapat diartikan sebagai rendahnya pendapatan per kapita dari suatu individu dan/atau keluarga. Namun apabila kemiskinan dipandang sebagai masalah sosial, maka dapat dikatakan adanya keterbatasan kemampuan suatu individu untuk terlibat dalam proses pembangunan, baik diakibatkan oleh kurangnya keterampilan dan pendidikan, maupun pengucilan sosial (*social exclusion*), sehingga membuat tingkat kesejahteraan individu tersebut menurun (Yustika, 2007). Masalah kemiskinan muncul ketika seseorang atau sekelompok orang tidak mampu mencukupi tingkat kemakmuran ekonomi yang dianggap sebagai kebutuhan minimal dari standar hidup tertentu.

Penyebab kemiskinan berasal dari tiga sumber, yakni struktural, kultural, dan sumber daya (Yustika, 2007). *Pertama*, kemiskinan struktural merupakan kondisi miskin yang disebabkan oleh kebijakan pemerintah yang masih belum memihak kepada penduduk miskin, atau dapat pula disebabkan oleh rendahnya akses terhadap sumber daya. *Kedua*, kemiskinan kultural dikarenakan adanya sikap/mental dari penduduk miskin tersebut yang tidak ingin berubah, yang sebagian ditunjukkan dengan adanya sikap malas, tidak mau berusaha untuk memperbaiki tingkat kehidupan, pemboros, tidak kreatif, dan lain sebagainya. *Ketiga*, kemiskinan sumber daya disebabkan oleh ketidaktersediaan sumber daya ekonomi dan sumber daya alam. Selanjutnya, ketiga penyebab kemiskinan tersebut akan berujung pada dua kondisi kemiskinan, yakni kemiskinan absolut dan kemiskinan relatif (Yustika, 2007). Kemiskinan absolut merupakan kondisi dimana penduduk miskin yang sudah berada di bawah garis kemiskinan, atau dengan kata lain tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup minimum termasuk sandang, pangan, papan, kesehatan, dan pendidikan yang diperlukan untuk bisa bertahan hidup dan bekerja. Sedangkan kemiskinan relatif merupakan kondisi dimana sebagian kelompok masyarakat memperoleh tingkat kesejahteraan (pendapatan) di bawah kelompok masyarakat yang lain. Hal ini dikarenakan adanya pengaruh kebijakan pembangunan yang masih belum menjangkau seluruh masyarakat, sehingga menyebabkan ketimpangan pendapatan, atau dapat pula dikatakan bahwa orang tersebut sebenarnya telah hidup diatas garis kemiskinan namun masih berada dibawah kemampuan masyarakat lainnya.

C. Pertumbuhan Ekonomi

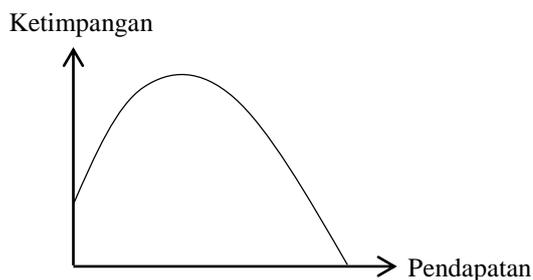
Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu indikator yang cukup penting dalam menganalisis terkait dengan pembangunan ekonomi yang terjadi pada suatu negara, atau dengan kata lain pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu indikasi keberhasilan dalam pembangunan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi merupakan peningkatan kemampuan suatu perekonomian dalam menciptakan barang dan jasa, sehingga nantinya dapat berdampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat (Sukirno, 2006). Pertumbuhan ekonomi menunjukkan sejauhmana aktivitas perekonomian dapat menghasilkan tambahan pendapatan masyarakat pada suatu periode tertentu. Pada dasarnya aktivitas perekonomian merupakan suatu proses pemanfaatan faktor-faktor produksi untuk menghasilkan output. Yang mana proses ini nantinya akan menghasilkan balas jasa terhadap faktor produksi yang dimiliki oleh masyarakat, sehingga dengan adanya pertumbuhan ekonomi maka pendapatan dari pemilik faktor produksi akan meningkat.

D. Ketimpangan Pendapatan

Ketimpangan atau kesenjangan (*disparitas*) merupakan salah satu masalah yang dihadapi oleh banyak negara berkembang, termasuk Indonesia. Distribusi pendapatan mencerminkan merata atau tidaknya pembagian hasil pembangunan suatu negara di kalangan penduduknya. Tidak meratanya distribusi pendapatan berarti terjadinya ketimpangan yang merupakan awal dari timbulnya masalah kemiskinan. Pada dasarnya, perbedaan pendapatan ini timbul karena adanya

perbedaan dalam kepemilikan sumber daya dan faktor produksi, terutama kepemilikan barang modal (*capital stock*). Kelompok masyarakat dengan kepemilikan faktor produksi yang lebih banyak, maka akan memperoleh pendapatan yang lebih tinggi. Beberapa ekonom telah memberikan perhatiannya terhadap bagaimana distribusi pendapatan berubah selama proses pembangunan berlangsung. Salah satunya adalah Simon Kuznets (1955) dengan membuat sebuah hipotesis adanya kurva U terbalik (*inverted U curve*) yang menjelaskan bahwa mulanya ketika pembangunan dimulai, distribusi pendapatan akan semakin tidak merata. Namun, setelah mencapai suatu tingkat pembangunan tertentu, maka distribusi pendapatan akan menjadi semakin merata (Kuncoro, 1997). Hal tersebut digambarkan dalam kurva Kuznets yang terdapat pada Gambar 4 yang menunjukkan bahwa dalam jangka pendek, terdapat korelasi positif antara pertumbuhan pendapatan per kapita dengan disparitas distribusi pendapatan. Namun, dalam jangka panjang hubungan keduanya akan berkorelasi negatif.

Gambar 4: Kurva ‘U Terbalik’ Kuznets



Sumber: Todaro, 2006.

E. Pengangguran

Dalam proses pembangunan ekonomi di negara berkembang, jumlah pengangguran yang semakin bertambah akan memperparah masalah, terutama setelah adanya distribusi pendapatan yang kurang menguntungkan masyarakat berpendapatan rendah. Hal ini dibuktikan dengan kondisi saat ini yang menunjukkan bahwa pembangunan ekonomi tidak mampu menciptakan kesempatan kerja yang lebih cepat dibandingkan pertambahan jumlah penduduk. Tingkat pengangguran yang tinggi akan menyebabkan rendahnya tingkat kesejahteraan masyarakat. Perluasan kesempatan kerja berarti akan semakin mendorong tenaga kerja yang dapat bekerja dan mendapatkan penghasilan, sehingga hal ini berdampak pula pada semakin banyaknya masyarakat yang mengalami peningkatan kesejahteraan. Menurut Badan Pusat Statistik, pengangguran dapat diartikan sebagai penduduk yang termasuk dalam kategori angkatan kerja (*labor force*) tetapi tidak memiliki pekerjaan, sedang mencari pekerjaan atau sedang mempersiapkan suatu usaha, yang bekerja kurang dari dua hari dalam seminggu, yang mencari pekerjaan karena merasa tidak mungkin untuk mendapatkan pekerjaan, atau individu yang sudah mempunyai pekerjaan tetapi belum memulai untuk bekerja.

Seringkali pengangguran disebabkan oleh adanya ketidakseimbangan pada pasar tenaga kerja, dimana jumlah penawaran tenaga kerja selalu melebihi jumlah permintaannya. Selain itu dapat pula disebabkan oleh perubahan struktur umur penduduk usia kerja yang ditunjukkan dari angka beban ketergantungan, distribusi tenaga kerja menurut lapangan pekerjaan yang dominan pada kegiatan informal, besarnya rata-rata upah yang diterima buruh belum mencapai standar upah minimum yang ditetapkan, dan lain sebagainya. Faktor lain yang dapat menyebabkan ketidakseimbangan tersebut adalah pertumbuhan ekonomi yang tidak sejalan dengan kemampuan penyerapan tenaga kerja yang memadai, rendahnya kualitas pendidikan penduduk usia kerja sehingga sulit untuk mendapatkan pekerjaan yang memadai, dan adanya penduduk usia kerja yang masuk kategori angkatan kerja. Berdasarkan cirinya pengangguran terbagi menjadi 4 jenis, berikut diantaranya (Sukirno, 2006):

1) Pengangguran Terbuka

Pengangguran jenis ini muncul sebagai akibat dari timpangnya peningkatan jumlah pekerja dengan ketersediaan lapangan pekerjaan, sehingga tidak semua penawaran tenaga kerja yang ada di pasar tenaga kerja mampu di serap seluruhnya oleh lapangan pekerjaan yang tersedia. Pengangguran terbuka adalah penduduk yang tergolong ke dalam angkatan kerja namun belum

memiliki pekerjaan atau sedang mencari pekerjaan, ataupun sudah memiliki pekerjaan namun belum mulai bekerja.

2) Pengangguran Tersembunyi

Pengangguran jenis ini terjadi pada sektor ekonomi yang dijalankan oleh tenaga kerja yang jumlahnya melebihi jumlah yang diperlukan. Artinya, tingkat produktivitas marjinal dari tenaga kerja adalah nol atau sangat rendah. Sehingga walaupun mereka bekerja, usaha tersebut tidak akan menaikkan jumlah produksi mereka.

3) Pengangguran Musiman

Pengangguran yang terjadi pada masa-masa tertentu dalam satu tahun, contohnya pada sektor yang membutuhkan tenaga kerja pada periode tertentu dalam satu tahun seperti pertanian, peternakan, ataupun perkebunan. Dimana kegiatan produksinya lebih sedikit dilakukan dibandingkan dengan pada masa-masa lainnya

4) Setengah Menganggur

Pengangguran jenis ini terjadi ketika suatu individu tidak dapat bekerja secara optimal karena ketiadaan lapangan kerja, atau pekerja yang hanya memiliki jam kerja kurang dari 35 jam dalam seminggu.

F. Peran Sektor Industri dalam Pembangunan

Peranan sektor pertanian dalam pembangunan ekonomi sangat penting, sebab sebagian besar masyarakat di negara berkembang dan negara miskin menggantungkan hidupnya pada sektor tersebut. Setidaknya terdapat dua hal yang menjadikan pentingnya sektor pertanian dalam pembangunan ekonomi (Arsyad, 1988). *Pertama*, dalam hal penyediaan input berupa tenaga kerja bagi sektor industri dan sektor modern lainnya. Arsyad mengatakan jika perpindahan tenaga kerja dari sektor pertanian ke sektor-sektor modern dibatasi, maka akan terjadi ketimpangan dalam proses pembangunan ekonomi. *Kedua*, sektor pertanian merupakan sumber modal utama bagi pertumbuhan ekonomi modern. Modal yang dimaksud berasal dari tabungan yang diinvestasikan dan tabungan yang berasal dari pendapatan. Setidaknya terdapat dua masalah mendasar pada sektor pertanian di Indonesia (Yustika, 2011). *Pertama*, kepemilikan lahan yang sangat kecil (sempit). Mengecilnya rata-rata kepemilikan lahan tersebut disebabkan oleh konversi lahan pertanian untuk kepentingan diluar pertanian, seperti pabrik, *realestate*, pusat perbelanjaan, perkantoran, dan sebagainya. Hal semacam ini akan mengakibatkan menurunnya efisiensi dan produktivitas. *Kedua*, menyingkirkan kondisi-kondisi yang menyebabkan sektor pertanian termasuk di dalamnya para petani, yang selama ini masih dijadikan sebagai pihak yang selalu kalah dan tersingkirkan.

Rahardjo menyebutkan beberapa alasan terkait dengan pentingnya mengembangkan sektor pertanian (Rahardjo, 1986). *Pertama*, output dari sektor industri tentunya memerlukan dukungan daya beli masyarakat, karena sebagian besar calon pembelinya adalah masyarakat petani yang merupakan mayoritas penduduk di negara berkembang, maka pendapatan mereka perlu ditingkatkan melalui pembangunan pertanian. *Kedua*, untuk menekan biaya produksi dari komponen upah diperlukan ketersediaan bahan makanan yang murah, sehingga upah yang diterima dapat dipakai untuk memenuhi kebutuhan pokok lainnya bagi para buruh. Hal ini dapat tercapai apabila produksi hasil pertanian, terutama pangan, dapat lebih ditingkatkan, sehingga harganya bisa lebih murah dan terjangkau oleh daya beli masyarakat. *Ketiga*, industri juga membutuhkan bahan mentah yang berasal dari sektor pertanian, sehingga produksi bahan-bahan industri menjadi basis bagi pertumbuhan kedua sektor tersebut.

G. Peran Sektor Industri dalam Pembangunan

Proses pembangunan di Indonesia telah mengagendakan terjadinya pergeseran aktivitas ekonomi, dari yang semula fokus pada sektor pertanian kemudian beralih kepada sektor industri, atau sering dikenal dengan strategi industrialisasi. Dari waktu ke waktu proses industrialisasi memberikan dampak yang positif terhadap perekonomian Indonesia, seperti halnya laju pertumbuhan ekonomi yang tinggi, peningkatan pendapatan per kapita, dan kesempatan kerja yang kian meningkat. Namun jika dilihat secara keseluruhan, jika pembangunan dimaksudkan untuk mensejahterakan masyarakat, maka pelaksanaannya harus ditekankan pada wilayah-wilayah perdesaan, khususnya pada masyarakat yang bekerja di sektor pertanian (Yustika, 2011). Sektor industri merupakan sektor yang cukup penting, sehingga harus terus dikembangkan karena

produk-produk industri selalu memiliki “dasar tukar” (*term of trade*) yang lebih tinggi atau lebih menguntungkan, serta memiliki nilai tambah yang lebih besar dibandingkan dengan produk sektor lainnya. Selain itu, sektor industri juga memiliki variasi produk yang cukup beragam dan mampu memberikan manfaat marjinal yang lebih tinggi kepada pemakainya. Alasan lain adalah marjin keuntungan sektor industri lebih menarik dibandingkan dengan sektor lainnya. Keunggulan yang terakhir terkait dengan proses produksi serta penanganan produknya lebih bisa dikendalikan oleh manusia. Rahardjo menyebutkan beberapa alasan terkait dengan pentingnya mengembangkan sektor industri. *Pertama*, karena penanaman modal di sektor pertanian dirasa masih kurang menguntungkan atau dengan kata lain *marginal rate of return* dari sektor pertanian yang masih rendah. *Kedua*, adanya perkembangan jumlah penduduk yang akan memunculkan hukum yang makin berkurang (*law of diminishing return*). *Ketiga*, pertumbuhan sektor pertanian yang cenderung lambat, bahkan stagnan, yang disebabkan oleh adanya hambatan sosial dan institusional yang sulit diubah (Rahardjo, 1986).

C. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan data kuantitatif. Data yang digunakan adalah data panel. Data panel merupakan data kombinasi antara data *time series* dan data *cross-section*. Di dalam penelitian ini, menggabungkan data dari 38 Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Timur sebagai data *cross-section* dengan menggunakan periode 2009-2015 sebagai data *time series*. Fokus pada penelitian ini adalah seberapa besar dampak yang ditimbulkan oleh variabel bebas terhadap variabel terikat. Variabel terikat (*dependent variable*) merupakan variabel yang dijelaskan. Sedangkan variabel bebas (*independent variable*) merupakan variabel penjelas. Ruang lingkup penelitian ini adalah seberapa besar pengaruh variabel-variabel bebas, yaitu pertumbuhan ekonomi, ketimpangan pendapatan, pengangguran, dan sektor pertanian, serta sektor industri terhadap variabel terikat yaitu tingkat kemiskinan pada 38 Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur. Periode pengamatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah tahun 2009 sampai dengan tahun 2015 (selama 7 tahun). Alasan dari pemilihan periode penelitian didasarkan pada anggapan bahwa selama periode tersebut, variabel-variabel bebas diharapkan mampu menjelaskan sekaligus memberikan informasi dengan tepat terkait dampaknya terhadap variabel terikat. Di samping itu pula dikarenakan adanya pertimbangan atas faktor ketersediaan data. Variabel kemiskinan (POV) dihitung berdasarkan persentase penduduk miskin dalam satuan persen. Variabel pertumbuhan ekonomi dihitung berdasarkan peningkatan PDRB dalam satuan persen. Variabel pengangguran dihitung berdasarkan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) yang merupakan persentase jumlah pengangguran terhadap jumlah angkatan kerja, dan dinyatakan dalam satuan persen. Variabel sektor pertanian dan sektor industri dihitung berdasarkan kontribusi kedua sektor tersebut terhadap PDRB dan dinyatakan dalam satuan persen. Berikut model persamaan dalam penelitian ini.

$$POV_{it} = \alpha_i + \beta_1 GRO_{it} + \beta_2 GINI_{it} + \beta_3 UNP_{it} + \beta_4 AGR_{it} + \beta_5 IND_{it} + e_{it}$$

Keterangan:

POV_{it} : Kemsikinan (%)

GRO_{it} : Pertumbuhan Ekonomi (%)

GINI_{it} : Ketimpangan Pendapatan (indeks gini)

UNP_{it} : Tingkat Pengangguran Terbuka (%)

AGR_{it} : *Share* Sektor Pertanian terhadap PDRB (%)

IND_{it} : *Share* Sektor Industri terhadap PDRB (%)

α : Intersep

$\beta_1 - \beta_5$: Koefisien variabel bebas

e_{it} : Error term

i : Data *Cross Section* 38 Kabupaten/Kota di Jawa Timur

t : Data *Time Series* tahun 2009-2015

D. HASIL DAN PEMBAHASAN

HASIL PENELITIAN

A. Pemilihan Model Regresi Panel

1. Uji Chow
Hasil uji chow menunjukkan bahwa nilai *F-statistic* sebesar 52.577388 dengan probabilitas sebesar 0.0000 kurang dari tingkat signifikansi (α) sebesar 5% atau 0.05. dengan demikian berdasarkan hasil tersebut, dalam mengetimasi regresi panel lebih tepat menggunakan *Fixed Effect Model* (FEM) dibandingkan *Pooled Least Square* (PLS).
2. Uji Hausman
Hasil uji hausman menunjukkan bahwa nilai *Chi-Square Statistic* sebesar 17.420017 dengan probabilitas sebesar 0.0038 kurang dari tingkat signifikansi (α) sebesar 5% atau 0.05. dengan demikian berdasarkan hasil tersebut, dalam mengetimasi regresi panel lebih tepat menggunakan *Fixed Effect Model* (FEM) dibandingkan *Random Effect Model* (REM).
3. Uji Lagrange Multiplier
Hasil uji chow menunjukkan bahwa nilai *Cross Section Breusch-Pagan* sebesar 525.9564 dengan probabilitas sebesar 0.0000 kurang dari tingkat signifikansi (α) sebesar 5% atau 0.05. dengan demikian berdasarkan hasil tersebut, dalam mengetimasi regresi panel lebih tepat menggunakan *Random Effect Model* (REM) dibandingkan *Pooled Least Square* (PLS).

B. Uji Asumsi Klasik

1. Uji Normalitas
Hasil uji normalitas menggunakan *Uji Jarque-Bera* menunjukkan bahwa nilai probabilitas *Jarque-Bera* sebesar $0.09 > 0.05$, sehingga dapat disimpulkan bahwa data dalam penelitian terdistribusi normal.
2. Uji Multikolinieritas
Hasil uji multikolinieritas menunjukkan bahwa masing-masing variabel memiliki nilai $VIF < 10$, sehingga dapat disimpulkan tidak terjadi multikolinieritas.
3. Uji Heteroskedastisitas
Hasil uji heteroskedastisitas menggunakan *Uji Glejser* menunjukkan bahwa probabilitas $Obs^*R\text{-squared}$ sebesar $0.6242 > 0.05$, sehingga dapat disimpulkan tidak terjadi masalah heteroskedastisitas.
4. Uji Autokorelasi
Hasil uji autokorelasi menggunakan *Uji Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test* menunjukkan bahwa probabilitas $Obs^*R\text{-squared}$ sebesar $0.5155 > 0.05$, sehingga dapat disimpulkan tidak terjadi masalah autokorelasi.

C. Uji Statistik

1. Koefisien Determinasi
Nilai *R Square* pada persamaan dalam penelitian ini sebesar 0.947788 yang berarti 94.8% variabel pertumbuhan ekonomi, ketimpangan pendapatan, pengangguran, sektor pertanian, dan sektor dapat menjelaskan variasi dari kemiskinan, sedangkan sisanya sebesar 5.2% dijelaskan variabel lain di luar model.
2. Uji t

Tabel 1: Hasil Uji t

Variabel	t	Sig.	Keterangan
Pertumbuhan Ekonomi	3.520344	0.0005	H1 Diterima
Ketimpangan Pendapatan	6.634462	0.0000	H2 Diterima
Pengangguran	2.272777	0.0240	H3 Diterima
Sektor Pertanian	4.535600	0.0000	H4 Diterima
Sektor Industri	2.060645	0.0705	Menolak H5

PEMBAHASAN

A. Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Kemiskinan

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi berpengaruh signifikan terhadap kemiskinan. Hal tersebut dapat dibuktikan dengan nilai signifikansi sebesar 0.0005 lebih kecil dari nilai signifikansi α sebesar 5% ($0.0005 < 0.05$). Sementara nilai koefisien dari variabel pertumbuhan ekonomi sebesar 0.232393 yang mengindikasikan bahwa pertumbuhan ekonomi berpengaruh positif terhadap kemiskinan. Dapat diartikan bahwa apabila pertumbuhan ekonomi meningkat sebesar 1 persen maka tingkat kemiskinan akan meningkat sebesar 0.23 persen. Hasil penelitian ini tidak sesuai dengan teori *trickle down effect* yang menyatakan bahwa pertumbuhan ekonomi dapat mengurangi jumlah penduduk miskin pada suatu wilayah, dimana akan ada bagian dari pertumbuhan ekonomi yang menetes kebawah dari penduduk kaya kepada penduduk miskin. Sehingga dengan adanya pertumbuhan ekonomi yang tinggi akan semakin mempersempit kesenjangan antara kelompok kaya dan kelompok miskin. Namun sebaliknya, ketika pertumbuhan ekonomi semakin memperlebar kesenjangan antara daerah kaya dengan daerah miskin maka akan terjadi suatu proses pengkutuban (*polarization effect*). Proses pengkutuban (*polarization effect*) terjadi ketika setiap sektor yang berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi tidak memiliki keterkaitan antara sektor yang satu dengan sektor-sektor lainnya. Sektor-sektor yang bersifat padat modal (*capital intensive*) mengalami kemajuan yang cukup pesat, dan berhasil memberikan sumbangan yang cukup besar terhadap pertumbuhan ekonomi suatu daerah. Sedangkan sektor-sektor yang bersifat padat karya (*labor intensive*) cenderung lebih lambat dalam sumbangannya terhadap pertumbuhan ekonomi suatu daerah. Akibatnya, peningkatan laju pertumbuhan ekonomi yang terjadi di suatu daerah hanya akan dinikmati oleh segelintir kelompok kaya, yang ekonominya ditunjang oleh sektor industri. Sedangkan sebagian besar masyarakat perdesaan yang ekonominya di tunjang oleh sektor pertanian akan semakin miskin, akibat dari masih rendahnya kontribusi sektor pertanian terhadap perekonomian. Ketika hasil dari pertumbuhan ekonomi hanya dinikmati oleh segelintir orang, maka dengan adanya pertumbuhan ekonomi yang semakin meningkat akan menyebabkan peningkatan pendapatan per kapita masyarakat. Peningkatan pendapatan akan meningkatkan daya beli masyarakat. Kemudian terjadilah inflasi yang membuat harga-harga menjadi mahal, termasuk biaya pendidikan dan kesehatan. Hal ini akan semakin memperlebar ketimpangan antar kelompok masyarakat dan akan semakin menyulitkan akses kesejahteraan bagi penduduk miskin, serta berpotensi membuat kondisi dimana yang kaya semakin kaya dan yang miskin semakin miskin.

B. Pengaruh Ketimpangan Pendapatan Terhadap Kemiskinan

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa ketimpangan pendapatan berpengaruh signifikan terhadap kemiskinan. Hal tersebut dapat dibuktikan dengan nilai signifikansi sebesar 0.0000 lebih kecil dari nilai signifikansi α sebesar 5% ($0.0000 < 0.05$). Sementara nilai koefisien variabel ketimpangan pendapatan sebesar 19.58729 yang mengindikasikan bahwa ketimpangan pendapatan berpengaruh positif terhadap kemiskinan. Dapat diartikan bahwa apabila ketimpangan pendapatan meningkat sebesar 1 satuan maka akan meningkatkan kemiskinan sebesar 19.59 persen. Indeks gini di Jawa Timur sejak tahun 2009 hingga tahun 2015, menunjukkan tren yang fluktuatif dan cenderung meningkat. Angka indeks gini yang semakin meningkat mengindikasikan bahwa hasil dari capaian pertumbuhan ekonomi masih belum terdistribusi secara merata. Banyak faktor yang menyebabkan peningkatan pada indeks gini. Salah satunya adalah karena adanya pembangunan yang tidak inklusif, yaitu manfaat dari capaian pertumbuhan ekonomi tidak terdistribusi secara merata pada seluruh kelompok masyarakat. Hal ini dibuktikan dari peningkatan pendapatan riil pada masyarakat kelompok bawah yang jauh lebih sedikit dibandingkan peningkatan pendapatan riil pada masyarakat kelompok atas. Pada kelompok masyarakat berpendapatan rendah mengalami peningkatan sebesar 0,14 persen, sedangkan pada kelompok masyarakat berpendapatan tinggi terjadi peningkatan sebesar 0,83 persen. Penyebab lainnya adalah masih terfokusnya pembangunan hanya di salah satu sektor akan membuat sektor tersebut menjadi lebih unggul dibandingkan dengan sektor-sektor lainnya. Alhasil akan memunculkan ketimpangan antar sektor. Kesenjangan diantara sektor-sektor ini nantinya akan membuat distribusi pendapatan antar kelompok masyarakat menjadi tidak merata, sebab manfaat dari pertumbuhan ekonomi yang telah dicapai hanya akan dirasakan oleh sebagian kecil kelompok masyarakat yang berada di dalam sektor-sektor tertentu (sektor yang berkontribusi tertinggi terhadap PDRB).

C. Pengaruh Pengangguran Terhadap Kemiskinan

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengangguran berpengaruh signifikan terhadap kemiskinan. Hal tersebut dapat dibuktikan dengan nilai signifikansi sebesar 0.0240 lebih kecil dari nilai signifikansi α sebesar 5% ($0.0240 < 0.05$). Sementara nilai koefisien variabel pengangguran sebesar 0.215234 yang mengindikasikan bahwa pengangguran berpengaruh positif terhadap kemiskinan. Dapat diartikan bahwa apabila pengangguran meningkat sebesar 1 persen maka akan meningkatkan kemiskinan sebesar 0.21 persen. Angka pengangguran di Jawa Timur selalu mengalami peningkatan di setiap tahunnya. Peningkatan ini disebabkan karena adanya ketidakseimbangan di pasar tenaga kerja, dimana jumlah penawaran tenaga kerja lebih tinggi dibandingkan dengan jumlah permintaannya, sehingga jumlah angkatan kerja yang ada tidak dapat terserap seluruhnya pada lapangan kerja yang tersedia. Akibatnya jumlah pengangguran semakin bertambah. Meningkatnya jumlah pengangguran disebabkan oleh beberapa faktor, seperti meningkatnya jumlah penduduk, rendahnya kualitas pendidikan, kenaikan upah minimum, dan masih banyak yang lainnya. Pengangguran dan kemiskinan memiliki keterkaitan yang cukup erat. Sesuai dengan hasil pada penelitian ini bahwa tingginya akan meningkatkan angka kemiskinan. Hal ini didasarkan pada suatu kondisi dimana masyarakat yang menganggur tidak memiliki penghasilan atau pendapatan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Rendahnya pendapatan menjadi penyebab seseorang digolongkan sebagai penduduk miskin. Wilayah dengan tingkat pengangguran yang tinggi, cenderung memiliki angka kemiskinan yang tinggi pula. Untuk itu, salah satu hal yang dapat dilakukan dalam mengatasi tingginya angka kemiskinan di suatu wilayah adalah dengan cara meningkatkan peluang kerja, meningkatkan upah minimum, memperbaiki kualitas pendidikan, dan lain sebagainya. Dengan begitu, tingkat pengangguran berangsur-angsur akan menurun, dan berdampak langsung pada penurunan tingkat kemiskinan.

D. Pengaruh Sektor Pertanian Terhadap Kemiskinan

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa sektor pertanian berpengaruh signifikan terhadap kemiskinan. Hal tersebut dapat dibuktikan dengan nilai signifikansi sebesar 0.0000 lebih kecil dari nilai signifikansi α sebesar 5% ($0.0000 < 0.05$). Sementara nilai koefisien variabel sektor pertanian sebesar 0.484720 yang mengindikasikan bahwa sektor pertanian berpengaruh positif terhadap kemiskinan. Dapat diartikan bahwa apabila sektor pertanian meningkat sebesar 1 persen maka akan meningkatkan kemiskinan sebesar 0.48 persen. Pengaruh positif sektor pertanian terhadap kemiskinan dikarenakan masih terdapat masalah-masalah yang terjadi pada sektor pertanian. Salah satunya terkait lahan pertanian yang semakin sempit, yang disebabkan oleh semakin maraknya alih fungsi lahan pertanian. Hal ini berkaitan dengan semakin banyaknya bangunan baru seperti gedung dan perumahan akibat dari adanya peningkatan laju pertumbuhan penduduk serta peningkatan arus urbanisasi yang membuat semakin banyaknya pendatang baru di kota-kota besar. Penyebab lainnya yaitu harga jual produk yang rendah, terutama saat musim panen terjadi. Peningkatan produk pertanian akan menyebabkan turunnya harga apabila tidak disertai dengan peningkatan permintaan. Terlebih lagi para tengkulak akan lebih mudah menekan harga produk sehingga laba yang diterima oleh para petani belum mampu menutup biaya produksi. Selain itu, kurangnya kepemilikan faktor produksi di kalangan petani, misalnya seperti lahan pertanian. Ketika mereka memiliki lahan pertanian artinya mereka bekerja untuk diri mereka sendiri sehingga hasil dari proses produksi yang mereka terima lebih besar.

E. Pengaruh Sektor Industri Terhadap Kemiskinan

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa sektor industri tidak berpengaruh signifikan terhadap kemiskinan. Hal tersebut dapat dibuktikan dengan nilai signifikansi sebesar 0.0705 lebih besar dari nilai signifikansi α sebesar 5% ($0.0705 > 0.05$). Sementara nilai koefisien variabel sektor industri sebesar 0.391817 yang mengindikasikan bahwa sektor industri berpengaruh positif terhadap kemiskinan. Dapat diartikan bahwa apabila sektor industri meningkat sebesar 1 persen maka akan meningkatkan kemiskinan sebesar 0.39 persen, namun dengan pengaruh yang tidak signifikan. Pengaruh yang tidak signifikan tersebut disebabkan oleh adanya standar kualifikasi tenaga kerja di sektor industri membuat penduduk miskin sulit memasuki sektor tersebut, khususnya dalam bidang pendidikan dan keterampilan. Sehingga hanya kelompok masyarakat tertentu yang dapat menikmati hasil dari peningkatan *share* industri. Dengan demikian, perkembangan sektor industri tidak memberikan pengaruh yang signifikan terhadap pengentasan angka kemiskinan di Jawa Timur. Perlu adanya peran dari pemerintah di dalam pendistribusian

hasil perkembangan sektor industri yang terjadi saat ini agar manfaat tersebut dapat dirasakan tidak hanya oleh masyarakat kelompok menengah keatas melainkan juga oleh masyarakat kelompok menengah kebawah. Hal tersebut dapat dilakukan salah satunya dengan mendistribusikan pajak yang telah dibebankan kepada industri terhadap seluruh lapisan masyarakat, khususnya untuk membantu masyarakat ekonomi menengah kebawah. Dengan demikian, manfaat dari perkembangan sektor industri dapat dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat, sehingga dapat mempersempit jurang kesenjangan antara kelompok masyarakat serta menurunkan tingkat kemiskinan.

E. PENUTUP

Kesimpulan

Berdasarkan pada permasalahan yang telah dirumuskan, hasil pengolahan data, dan hasil analisa data, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Pertumbuhan ekonomi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kemiskinan. Hal ini dikarenakan manfaat dari pertumbuhan ekonomi masih belum terdistribusi secara merata pada setiap kelompok masyarakat.
2. Ketimpangan pendapatan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kemiskinan. Hal ini dikarenakan masih terfokusnya pembangunan hanya di sektor-sektor tertentu, sehingga membuat distribusi pendapatan semakin timpang.
3. Pengangguran berpengaruh positif signifikan terhadap kemiskinan. Hal ini dikarenakan adanya ketidakseimbangan pada pasar tenaga kerja, dimana jumlah penawaran tenaga kerja selalu melebihi jumlah permintaannya.
4. Sektor pertanian berpengaruh positif dan signifikan terhadap kemiskinan. Hal ini dikarenakan semakin maraknya praktik alih fungsi lahan pertanian, rendahnya harga jual produk, keterbatasan faktor produksi, dan lain sebagainya.
5. Sektor pertanian tidak berpengaruh signifikan terhadap kemiskinan. Hal ini dikarenakan tingginya standar kualifikasi tenaga kerja yang ditetapkan oleh sektor industri sehingga membuat penduduk miskin tidak mampu untuk memasuki sektor tersebut.

Saran

Pertumbuhan ekonomi yang tinggi memang merupakan sebuah prestasi bagi suatu wilayah. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi juga diyakin dapat menganggulangi masalah kemiskinan. Akan tetapi, tidak akan efektif jika hanya terfokuskan pada capaian pertumbuhan ekonomi yang tinggi. Diperlukan juga untuk memperhitungkan penyerapan tenaga kerja dan pemerataan pendapatan, serta sektor-sektor yang dapat berpengaruh langsung terhadap masyarakat miskin. Selain itu, tingginya tingkat pengangguran yang diakibatkan oleh terbatasnya lapangan pekerjaan. Sehingga membuat sebagian besar penduduk miskin lebih memilih bekerja di sektor informal karena terbatasnya pendidikan dan keterampilan yang mereka miliki. Untuk itu, pemerintah diharapkan mampu memberikan bantuan pemberdayaan usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM), seperti penyediaan kredit usaha rakyat (KUR), dan lain sebagainya. Sebab UMKM merupakan bidang usaha yang mampu menyerap tenaga kerja dari penduduk miskin yang rata-rata dari mereka memiliki tingkat pendidikan dan keterampilan yang rendah.

UCAPAN TERIMA KASIH

Kami mengucapkan terima kasih kepada Allah SWT, serta berbagai pihak yang telah membantu sehingga jurnal ini dapat terselesaikan. Ucapan terima kasih khusus kami sampaikan kepada Asosiasi Dosen Ilmu Ekonomi Universitas Brawijaya dan Jurusan Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi Universitas Brawijaya yang memungkinkan jurnal ini bisa diterbitkan.

DAFTAR PUSTAKA

- Ajija, S. R. (2011). *Cara Cerdas Menguasai Eviews*. Jakarta: Salemba Empat.
- Ardianto, T. (2016). Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Tingkat Kemiskinan Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur Tahun 2007-2013. 9.
- Arsyad, L. (1988). *Ekonomi Pembangunan*. Yogyakarta: STIE-YKPN.
- Attibrizi, A. (2016). Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Kemiskinan dan Hubungannya Dengan Keberpihakan Terhadap Masyarakat Miskin di Indonesia. *Tesis*.
- Bappenas. (2004). *Tata Cara Perencanaan Pengembangan Kawasan: Untuk Percepatan Pembangunan Daerah*. Jakarta: Direktorat Pengembangan Kawasan Khusus dan Tertinggal-Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.
- Bappenas. (2010). *Lampiran Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2010 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2010-2014*. Jakarta.
- BPS. (2016). *Produk Domestik Regional Bruto Provinsi-provinsi di Indonesia Menurut Lapangan Usaha*. Jakarta: Badan Pusat Statistik.
- Departemen Sosial RI. (2005). *Pokok-pokok Pikiran Rencana Pembangunan Jangka Panjang (PJP) Tahun 2005-2009 dan Pembangunan Jangka Menengah (PJM) Tahun 2004-2009*. Jakarta: Bidang Kesejahteraan Sosial.
- Elinur. (2012). Analisis Konsumsi dan Penyediaan Energi Dalam Perekonomian Indonesia. *Disertasi*.
- Firdaus, M. (2011). *Ekonometrika: Suatu Pendekatan Aplikatif*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Fitri, T. M. (2016). Analisis Dampak Transformasi Ekonomi Terhadap Kemiskinan di Jawa Timur. *JIM FEB Universitas Brawijaya*.
- Ghozali, I. (2005). *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program SPSS*. Semarang: BP Universitas Diponegoro.
- Hajiji, A. (2010). Keterkaitan Antara Pertumbuhan Ekonomi, Ketimpangan Pendapatan, dan Pengentasan Kemiskinan di Provinsi Riau 2002-2008. *Skripsi*.
- Jhingan, M. (1996). *Ekonomi Pembangunan dan Perencanaan*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Khomsan, A., Dharmawan, A. H., Saharrudin, Alfiasari, Syarief, H., & Sukandar, D. (2015). *Indikator Kemiskinan dan Misklasifikasi Orang Miskin*. Jakarta: Kerja Sama antara Fakultas Ekologi Manusia IPB dengan Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Kuncoro, M. (1997). *Ekonomi Pembangunan Teori, Masalah, dan Kebijakan*. Yogyakarta: UPP AMP YKPN.
- Kuncoro, M. (2013). *Metode Riset untuk Bisnis & Ekonomi*. Jakarta: Penerbit Erlangga.
- Machmud, A. (2016). *Perekonomian Pasca Reformasi*. Jakarta: Penerbit Erlangga.
- Martono, N. (2015). *Metode Penelitian Sosial: Konsep-konsep Kunci*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Nugraha, R. (2016, Juni 14). *Inilah Provinsi Sarang Kemiskinan di Indonesia*. Diambil kembali dari DW: www.dw.com/id/inilah-provinsi-sarang-kemiskinan-di-indonesia/g-19328443
- Rahardjo, M. (1986). *Transformasi Pertanian, Industrialisasi dan Kesempatan Kerja*. Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia (UI-Press).
- Rumagit, M. C. (2016). Pro-Poor Growth dan Desentralisasi Fiskal dalam Mewujudkan Pembangunan Ekonomi Inklusif di Kabupaten/Kota Sulawesi Utara. *Disertasi*.

- Safitri, R. I. (2015). *Pertumbuhan Ekonomi, Ketimpangan Pendapatan dan Kemiskinan: Analisis Data Provinsi Di Indonesia 2010-2013*.
- Suhartini, A. M. (2011). *Pro Poor Growth Tingkat Provinsi di Indonesia*. Tesis.
- Sukino. (2014). *Membangun Pertanian dengan Pemberdayaan Masyarakat Tani: Terobosan menanggulangi kemiskinan*. Yogyakarta: Pustaka Baru Press.
- Sukirno, S. (2006). *Ekonomi Pembangunan*. Jakarta: Kencana.
- Sun'an, M. (2015). *Ekonomi Pembangunan*. Jakarta: Mitra Wacana Media.
- Tambunan, T. (2015). *Perekonomian Indonesia Era Orde Lama Hingga Jokowi*. Bogor: Penerbit Ghalia Indonesia.
- Tambunan, T. T. (2009). *Perekonomian Indonesia*. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Todaro, M. P. (2000). *Pembangunan Ekonomi di Dunia Ketiga*. Jakarta: Erlangga.
- Todaro, M. P., & Smith, S. C. (2011). *Pembangunan Ekonomi*. Jakarta: Erlangga.
- Todaro, M., & Smith, S. (2011). *Pembangunan Ekonomi*. Jakarta: Penerbit Erlangga.
- Yustika, A. (2007). *Perekonomian Indonesia Satu Dekade Pascakrisis Ekonomi*. Malang: Badan Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Brawijaya.
- Yustika, A. (2011). *Dari Krisis Ke Krisis Potret Terkini Perekonomian Nasional*. Malang: UB Press.